

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penegakan Hukum**

Sebagaimana diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. stilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Sebelum membahas mengenai penegakan hukum pidana, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian hukum pidana itu sendiri.<sup>2</sup> Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar peraturan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta.*, 2010, hlm. 45

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung*, 1980, hlm 15

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian hukum acara pidana menurut Moeljatno, seperti yang dikutip oleh Sutomo bahwa Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>4</sup>

Van Bemellen seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya, memberikan penjelasan hukum acara pidana adalah sebagai berikut. Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.

1. Negara melalui alat-alat penyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil perbuatan-perbuatan yang perlu guna mengungkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijs material) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan sendiri;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm 13-14

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 2001) Hal.

<sup>5</sup> 9Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 15

Dengan demikian merujuk pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas, disini penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, dan apabila ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut maka dapat dikenai sanksi atau diancam dengan hukuman pidana. Kemudian mengenai pengertian Penegakan hukum pidana dapat diartikan bahwa suatu upaya atau usaha untuk mewujudkan agar hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut menjadi kenyataan.

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan keputusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman dalam proses beracara para penegak hukum tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, yang ada hanyalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya pengertian penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya non penal ini merupakan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau kejahatan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Contohnya :

- Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

## 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, contohnya polisi, jaksa, hakim dsb, dimana upaya ini lebih menekankan pada pemberantasan atau pengendalian setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yang mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>6</sup>

## B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.<sup>7</sup>

Sebagian besar pengertian korupsi dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wet Boek Van

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 113

<sup>7</sup> Liam, *Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics> , acces tgl 18 mei 2019

Strafrecht (Wvs) yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah negara kita. Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai saat ini Undang Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.<sup>8</sup>

Perbuatan korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain sebagai berikut

- 1) Korupsi menggerogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.
- 2) Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat.
- 3) Korupsi menurunkan disiplin nasional, karena dengan adanya praktek kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan prosedur menjadi dapat disimpangi.
- 4) Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (grass root) akan terpicu untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas.
- 5) Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karena segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar (suap).

---

<sup>8</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 9

- 6) Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dari keuangan negara.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).

6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
2. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
3. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
4. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
5. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
6. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
7. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
8. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
9. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
10. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
11. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
12. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
13. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
14. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
15. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
16. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).



17. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
18. Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
19. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
20. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

### **C. Tinjauan Wewenang Jaksa Dalam Pengawasan Putusan Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara yuridis formal terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu

1. Dibiidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang,
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a.peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b.pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c.pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d.pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
  - e.pengawasan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan<sup>10</sup>

*“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan”.*

Dengan didasarkan pada ketentuanketentuan diatas, maka jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (lex specialis). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana g

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.*

Berdasarkan uraian tersebut maka Kejaksaan berkedudukan sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana korupsi dan penuntut umum sesuatu perkara di muka persidangan. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menduduki posisi yang sangat penting, dan menentukan dengan posisinya diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan tahap tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mengukuhkan posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang sebagaimana termuat pada Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa

*“Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.*

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyidik diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi :

*“Tim Pemberantasan Korupsi mempunyai fungsi memimpin, mengordinir dan mengawasi semua alat-alat penegak hukum yang berwenang, baik sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan, penyidikan*

*dan penuntutan perkara-perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.*

Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.<sup>12</sup>

#### **D. Tinjauan Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak boleh hanya melihat satu sisi di mana pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Namun Ada banyak pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut. Aspek yang di lihat oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus secara keseluruhan. Melihat beberapa aspek terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut <sup>13</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

---

<sup>12</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 80

<sup>13</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

*“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa<sup>3</sup> :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah putusan bagi para pihak?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Yang perlu diperhatikan hakim adalah bahwasanya hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya. Pertimbangan hakim dalam memutus juga tidak terlepas akan 3 hal yang bepedoman pada<sup>14</sup>

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

---

<sup>14</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010) h. 27

persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan faktafakta yang terungkap tersebut.

Pertimbangan yuridis mengacu kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, secara yuridis hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini telah diatur secara limitatif dalam KUHP<sup>15</sup>

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, et. al. *Asas-Asas Hukum Pidana II (Rangkang Education : Yogyakarta, 2012)*, hlm.155

nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak tersing dari masyarakatnya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :

- 1) Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

### **3. Pertimbangan filosofis**

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya. Para “aktor” yang terlibat dalam proses para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klienien kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.<sup>17</sup> Sebelum menjatuhkan

---

<sup>16</sup> Wahyudi, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Maluku Tengah* (Makassar, 2012), hlm. 46.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 230.

putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan. Isi Keputusan Pengadilan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

*“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”*

Rumusan pengadilan tersebut berisi bahwasanya harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasardasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutuskan

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu<sup>18</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96*



3. Tahap Penentuan Pidana Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan yang di jatuhkan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, hakim dalam penjatuhan putusan akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.*

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.